

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Good Governance* dalam Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori *Good Governance* UNDP (1997), dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan penggunaan kendaraan dinas telah dilaksanakan dan dianalisis menggunakan empat indikator *Good Governance*, yaitu:

- a. *Accountability* (Akuntabilitas) dalam pengelolaan aset pada penggunaan kendaraan dinas telah diterapkan melalui pembagian tugas dan mekanisme tanggung jawab yang jelas berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 serta Surat Keputusan Bupati Nomor 188/37/KEP/412.013/2026. Pelaksanaan pertanggungjawaban dilakukan melalui berita acara serah terima (BAST), sistem e-BMD, rekonsiliasi secara berkala, hingga apel kendaraan dinas dan pelaporan administratif. Namun demikian, pelaporan penggunaan bersifat umum dan belum secara khusus menggambarkan penggunaan kendaraan dinas. Selain itu, proses pelaksanaan rekonsiliasi dan monitoring belum seluruhnya didukung oleh dokumentasi khusus berupa berita acara atau laporan pelaksanaan kegiatan.

- b. *Responsiveness* (Daya Tanggap) telah diwujudkan melalui koordinasi antar pengurus barang melalui media komunikasi kelompok, pencatatan penggunaan kendaraan dinas pada OPD tertentu, pembentukan tim sebagai bentuk koordinasi penanganan apabila terjadi pelanggaran, serta tindak lanjut terhadap permasalahan sesuai kewenangan masing-masing. Namun demikian, pencatatan penggunaan sebagai upaya preventif dalam pengelolaan penggunaan kendaraan dinas belum berjalan secara menyeluruh. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam mengetahui penggunaan kendaraan dinas ketika berada di luar kantor sehingga penggunaan kendaraan di luar jam kerja belum sepenuhnya diketahui secara langsung.
- c. *Rule of Law* (Aturan Hukum) telah diterapkan dengan menjadikan regulasi sebagai pedoman penggunaan kendaraan dinas, didukung penerbitan surat edaran pada momentum tertentu, serta penerapan konsistensi regulasi terhadap penggunaan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, jabatan, dan peruntukan. Namun demikian, sebagian besar OPD masih berpedoman pada regulasi yang bersifat umum sehingga pedoman teknis yang mengatur penggunaan kendaraan dinas secara rinci belum diterapkan secara menyeluruh.
- d. *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi) telah diterapkan melalui penggunaan kendaraan sesuai kebutuhan kedinasan serta upaya penggunaan kendaraan secara tepat agar tidak menimbulkan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Namun demikian, hasil penelitian masih

menunjukkan adanya beberapa kasus penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan kendaraan dinas serta meningkatkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Secara keseluruhan, penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan aset kendaraan dinas pemerintah daerah telah diterapkan sesuai dengan prinsip *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsiveness* (Daya Tanggap), *Rule of Law* (Aturan Hukum), serta *Effectiveness and Efficiency* (Efektivitas dan Efisiensi). Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar pelaksanaannya semakin konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Seluruh Pengelola Barang Milik Daerah
 - a. Mengembangkan mekanisme pelaporan yang dapat menyajikan penggunaan kendaraan dinas secara spesifik, sehingga riwayat penggunaan kendaraan dinas oleh masing-masing pengguna dapat terdokumentasi dengan jelas serta didukung oleh dokumentasi hasil rekonsiliasi dan monitoring untuk mendukung proses pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
 - b. Mendorong penerapan pencatatan penggunaan dinas secara lebih

merata pada seluruh OPD, termasuk pencatatan tujuan, waktu, dan penggunaan kendaraan, sehingga penggunaan kendaraan dinas ketika berada di luar kantor tetap dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya.

- c. Menyusun SOP ataupun pedoman teknis yang secara khusus mengatur penggunaan kendaraan dinas pada tingkat OPD, sehingga terdapat standar yang lebih jelas mengenai batasan penggunaan kendaraan dinas.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan melalui sosialisasi mengenai ketentuan penggunaan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, jabatan, dan peruntukannya agar penggunaan kendaraan dinas tetap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta penggunaan sumber daya yang efisien.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penerapan *Good Governance* pada seluruh tahapan pengelolaan aset daerah atau menggunakan objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Junaedi Karso. (2022). *Buku Ajar Good Governance* (Alviana C (ed.); 1st ed.). Penerbit Samudra Biru.
- Abdullah, D. (2016). HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(1), 83–103.
- Arenawati. (2016). *ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH* (2nd ed.). Graha Ilmu.
- Dinda Husnul Hotimah. (2022). *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*. GUEPEDIA.
- Donna Okthalia Setiabudhi. (2019). PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Donna Okthalia Setiabudhi 1 1. *The Studies of Social Science*, 1(1), 7–21.
- E-BMD Bojonegoro. (2025). *DAFTAR BARANG PADA PENGGUNA BARANG*. SIPD E-BMD. <https://bojonegoro.e-bmd.co.id/> diakses pada 12 Juni 2026
- Fadhallah. (2020). *WAWANCARA* (1st ed.). UNJ PRESS.
- Hanifah, H., Salsabillah, L., Fitri, A. T., & Febriani, R. M. (2025). Landasan Teori , Penelitian Relevan , Kerangka Berpikir Dan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(April), 391–404.
- Harfianah, S., Manusia, S. D., Informasi, T., & Pengelolaan, M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 2534–2549.
- Hartono, B. (2025). *Motor Dinas Kepala Desa Sidorejo Diduga Disalahgunakan, Plat Merah Berubah Hitam*. Media Rajawali. <https://share.google/dX2caG7Dd962pM7tJ> diakses pada 28 November 2025
- Heliana, S. (2024). Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial (JMHS)*, 2(1), 25–31.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1, 1–9.
- Kabar Jagad. (2025). *Camat Kasiman Bojonegoro Kena Sanksi atas Penyalahgunaan Mobil Dinas*. Media Kabar Jagad. <https://www.kabarjagad.id/uncategorized/camat-kasiman-bojonegoro-kena-sanksi-atas-penyalahgunaan-mobil-dinas/> diakses pada 27 November 2025

- Khaerunnisa, F., & Hoerudin, C.W. (2022). Pengelolaan Kendaraan Dinas Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. *Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 4(2), 72–82.
- Lingkarjonegoro. (2025). *VIRAL! Motor Dinas Diduga Dipakai Anak Sekolah di Bojonegoro*. <https://www.instagram.com/p/DJVXMZDSTX-/?igsh=anVsMXV6MXZ1OGJ1> diakses pada 27 November 2025
- Mardi Candra. (2024). *Birokrasi dan Good Governance* (1st ed.). Kencana.
- Mardianata, M. A. (2025). *Manajemen Aset Daerah, Tata Kelola, dan Transparansinya* (1st ed.). Eurika Media Aksara.
- Marhadila, F., Firdaus, F. P., Dewi, I., Kadilla, R., & Apriliani, P. F. (2024). *Optimalisasi Pentingnya Konsep Good Governance dalam Sektor Publik dan Privat*. 01(04), 811–823.
- Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). *Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah The importance of information systems for regional property management*. 18(2), 295–302.
- Neova Derenov, R. Y. R. (2023). ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–148.
- Nurfajriani, W. V., Wahyu, M., Arivan, I., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833.
- Nurhidayat, I. (2023). PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1, 40–52.
- Panca Prasetyo Aprilianto, Laila Kholid Alfirdaus, D. E. (2024). PENGELOLAAN ASET BERGERAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 610–629.
- PEMKAB Bojonegoro. (2026). *Jaga Integritas Lebaran, Bupati Bojonegoro Terbitkan SE Pengendalian Gratifikasi dan Larangan Fasilitas Dinas*. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. <https://bojonegorokab.go.id/berita/9380/jaga-integritas-lebaran-bupati-bojonegoro-terbitkan-se-pengendalian-gratifikasi-dan-larangan-fasilitas-dinas> diakses pada 21 Juni 2026
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2016).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2024).
- Prameswari, D. M., & Muljanto, M. A. (2025). Efektivitas Pengelolaan Aset Kendaraan di Setda Jombang : Kajian atas Kebijakan Sewa Kendaraan Dinas. *Cendekia Ilmiah*, 4(2), 71–78.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Rinanda, H. (2025). 6 Fakta Viral Mobil Dinas Camat Bojonegoro Nekat Dipakai Mudik. Detik Jatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7858603/6-fakta-viral-mobil-dinas-camat-bojonegoro-nekat-dipakai-mudik> diakses pada 27 November 2025
- Rivai, S. K., Gobel, L. Van, & Nggilu, R. (2025). Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam mewujudkan good governance di badan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(4), 975–983.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (1st ed.). CV BUDI UTAMA.
- Sholeh, M., Widjajanti, K., & Lestari, R. I. (2024). Implementation of good governance in the implementation of procurement of goods and services electronically in the Central Java. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 266–279.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA cv.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif*. ALVABETA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undari Sulung, M. M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(September), 110–116.
- UNDP. (1997). *Governance For Sustainable Human Development- A UNDP Policy Document*. UNDP.
- Utomo, W. W. (2025). Tiga Mobil Hilux di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkab Bojonegoro di Duga Langgar Regulasi. Suara Bojonegoro. <https://suarabojonegoro.com/tiga-mobil-hilux-di-dinas-perpustakaan-dan-kearsipan-pemkab-bojonegoro-di-duga-langgar-regulasi/> diakses pada 28

November 2025

Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(November), 22–33.